



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Perbaikan Citra Butuh Kesadaran Untuk Berubah
Tanggal	: Rabu, 27 Oktober 2021
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 2



Sebagian anggota DPR yang hadir secara langsung dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (7/10/2021). Berdasarkan survei Litbang Kompas yang dilakukan pada Oktober 2021, kinerja anggota DPR dinilai belum memuaskan sehingga membuat citra DPR belum juga membaik. KOMPAS/HERU SHIKUMOHO

## Perbaikan Citra Butuh Kesadaran untuk Berubah

Mengubah persepsi publik butuh kesadaran anggota DPR mengubah dirinya masing-masing terlebih dahulu untuk meningkatkan kinerja. Tanpa kesadaran diri, perubahan itu tak berarti.

JAKARTA, KOMPAS — Publik masih mempersepsi DPR dengan citra buruk dibandingkan dengan lembaga negara lainnya. Hal itu membuat kesadaran untuk mengubah citra anggota DPR untuk mengubah diri masing-masing guna meningkatkan kinerjanya. Tanggungjawab diri dalam tugas kerja pengawasan, penganggaran, dan pembuatan legislasi, citra buruk DPR secara institusi dan pribadi akan terus melekat di benak publik.

Survei Litbang Kompas, Oktober 2021, menunjukkan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih mendapatkannya penghargaan dari publik, lembaga-lembaga negara lainnya. Sebanyak 93 persen responden mempersepsi TNI sebagai tentera bangsa. Diketahui bahwa dua Polri yang angkatan sama dengan pemerintah daerah (pemda), yaitu dengan persentase 77 persen responden.

Berikutnya Mahkamah Konstitusi (73 persen), Mahkamah Agung (73 persen), kejaksaan (72 persen), dan lembaga penegak hukum Komisi (69 persen), DPR (62 persen), DPR (55 persen), dan partai politik (55 persen). Sebagi ini ditularkan terhadap 1.200 responden dengan wawancara tatap muka.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Agil Oktaryal, mengatakan, citra

DPR yang belum mengembangkan banyak dipengaruhi oleh penilaian terhadap kinerja DPR secara umum. Publik memperhatikan anggota DPR dalam tugas dan usaha terus dilakukan dengan maksimal untuk menehkan citra negatif di masyarakat. Karena itu, anggota DPR akan terus mengawas, menganggaran, dan membangun kepercayaan masyarakat.

"Kalaupun ada masukan dari masyarakat dan kami juga perlu mengambilnya, bukan sebagai 'bahan' korban atau transisi, bahkan LSM yang sering memberikan kritik, kami terima menjadi masukan," ujarnya.

Menurut Agil, anggota DPR bisa memberikan laporan langsung lewat situs web ataupun media sosial untuk kemudian dilakukan rapat dengan pemimpin umum dengan perwakilan masyarakat. Bahkan, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, bisa berkoordinasi dengan lembaga-lembaga khusus untuk menyampaikan aspirasi ataupun berunjuk rasa. "Namun, karena pandemi Covid-19, ini itu belum dilakukan dalam bentuk fisik."

Fraksi-fraksi di DPR pun menyadari kecenderungan citra buruk DPR ini. Sebagai institusi yang seharusnya keterbukaan dan transparansi, atas berbagai fraksi-fraksi yang merepresentasikan warna politik masing-masing, perbaikan citra lembaga menjadi tugas anggota bersama

semua fraksi tanpa terkecuali.

### Bahan Instruksional

Menyikapi masih rendahnya citra lembaga perwakilan ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron, dan Supratikno mengatakan, DPR telah melakukan berbagai upaya untuk turut serta memfasilitasi perbaikan bangsa, baik melalui fungsi pengawasan, penganggaran, maupun legislasi. Di bidang legislasi, misalnya, ada dua terobosan besar di masa pandemi yang yakni mengenai Perppu No 1/2020 menjadi UU No 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan di masa pandemi Covid-19, dan UU Cipta Kerja.

Dua undang-undang itu menjawab kebutuhan publik akan perbaikan bangsa di masa pandemi. Dengan UU No 2/2020, pemerintah bisa lebih luas melakukan *refocusing* anggaran untuk optimalkan penanggulangan pandemik dan dampaknya. Demikian juga UU Cipta Kerja yang ingin memudahkan arus investasi masuk, sebagai respon pemulihran ekonomi.

"Kalaupun citra DPR masih buruk, dan belum memuaskan, itu juga tidak berpengaruh pada DPR untuk memastikan DPR sebagai lembaga yang fungsional. Kalau pun ada yang belum puas, DPR tentu tak bisa memuaskan semua pihak," ucapnya.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Salih Partaonan Dau lay mengatakan, hasil survei menjadi referensi penting pembuktian bahwa DPR masih dihinggai pegawai keselektaritan mesti berbenah memperbaiki diri.

Wakil Ketua Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan, hasil survei menjadi instruksional bagi anggota DPR. Anggota Komisi I DPR yang juga Juru Bicara Fraksi Gerindra, Habiburohman, mengatakan, kerja DPR tak bisa instan seperti ekskul. Banyak kerja yang harus terasa minatnya setelah beberapa waktu di putuskan.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sulaiman mengatakan, rendahnya citra DPR dipengaruhi karakter DPR sebagai lembaga politik yang mempunyai perbedaan pendapat.

Sementara Sekretaris Fraksi Sementara Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi berpendapat, menurunnya citra DPR merupakan hal yang wajar karena persepsi publik kадang naik dan turun. (REK/SYA)

► [klik.kompas.id/polhuk](http://klik.kompas.id/polhuk)



Baca artikel lainnya seputar Politik dan Hukum di Kompas.id dengan memindai QR Code.